



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**LKjIP**

**TAHUN 2020**

**JL. SM. AMIN NO. 92 TELP.0761)  
564550-564541 PEKANBARU**

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*



Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan media untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang dapat dicapai selama tahun anggaran 2020.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Pekanbaru, Januari 2021  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,  
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Riau



**Ir. M. TAUFIO OESMAN HAMID, MT**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19680718 200003 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	
<b>1.2 Struktur Organisasi.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Aspek Strategis Organisasi.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Permasalahan Utama.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Sistematika Penyajian.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Tahun 2019 - 2024.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2 Analisis Pencapaian Kinerja.....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Akuntabilitas Anggaran.....</b>	<b>40</b>
<b>3.4 Analisis Efisiensi.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 Kesimpulan Umum.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta dalam rangka mewujudkan Good Government, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Riau 2019- 2024.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor faktor kunci keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

## 1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, maka Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas, ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan Program;
  - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - c. Subbagian Kepagawain dan Umum.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

Perencana Madya, Perencana Muda dan Perencana Pertama;
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
5. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya

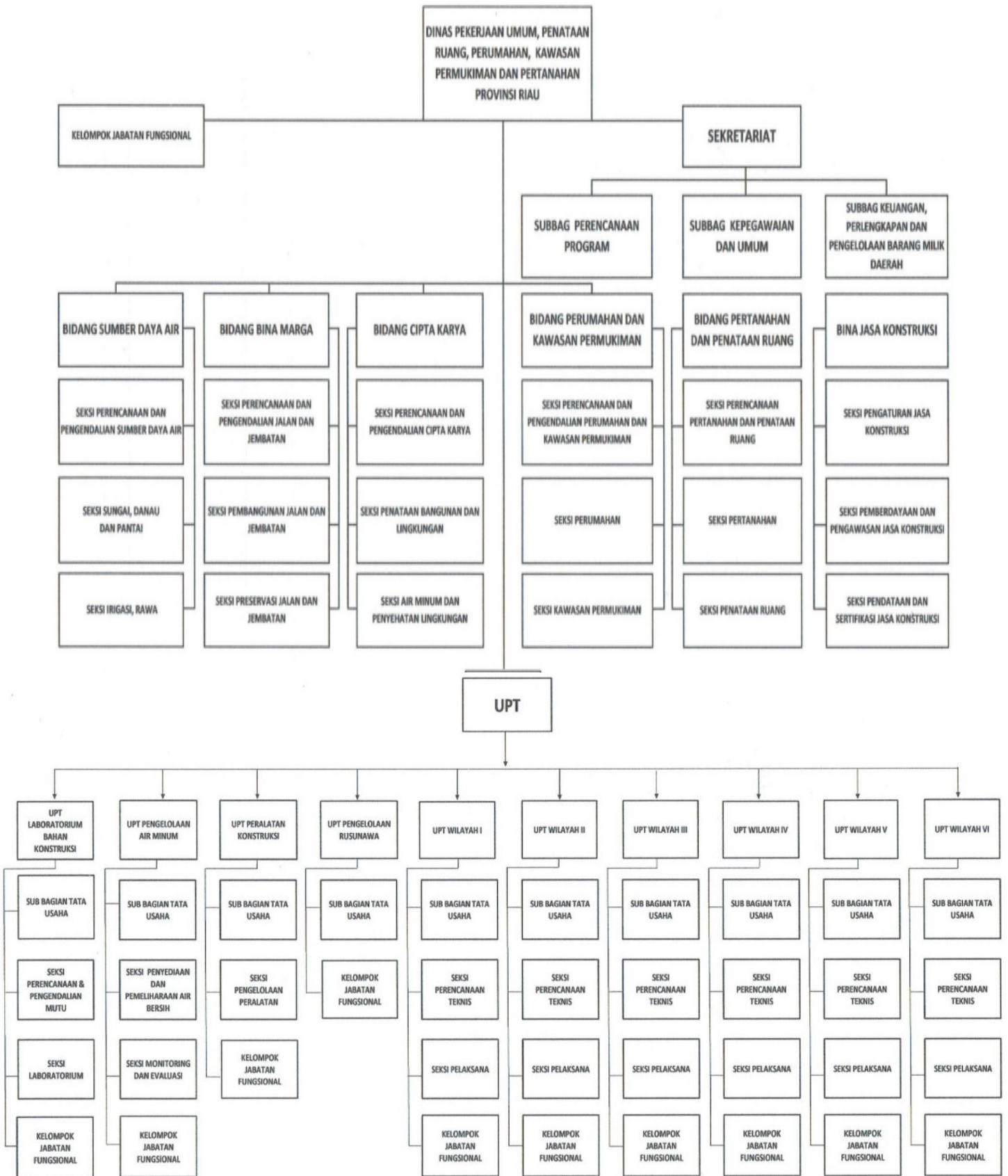
- b. Seksi Penataan Bangunan dan lingkungan;
  - c. Seksi Air minum dan Penyehatan Lingkungan.
7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Seksi Perumahan; dan
  - c. Seksi Kawasan Permukiman
8. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  - b. Seksi Pertanahan; dan
  - c. Seksi Penataan Ruang.
9. Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
  - c. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Jasa Konstruksi;
10. Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah I
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencana Teknis;
  - c. Seksi Pelaksana dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah II
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencana Teknis;
  - c. Seksi Pelaksana dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah III
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencana Teknis;
  - c. Seksi Pelaksana dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah IV
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencana Teknis;
  - c. Seksi Pelaksana dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah V
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencana Teknis;
  - c. Seksi Pelaksana dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah VI
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencana Teknis;
  - c. Seksi Pelaksana dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Unit Pelaksanaan Teknis Peralatan Konstruksi;
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengelolaan Peralatan UPT Peralatan Konstruksi
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi

- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Perencanaan Pengendalian Mutu
  - c. Seksi Laboratorium
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
18. Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Minum
- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Bagan Organisasi**  
**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**



### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Bila melihat Struktur Organisasi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai peran strategis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau.

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran diyakini akan dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan, kesenjangan antar daerah dan wilayah, memperkuat ketahanan pangan bahkan dapat mengurangi tekanan urbanisasi.

Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai manfaat langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, di samping itu juga berperan sebagai pendukung kelancaran pembangunan sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan perkebunan serta sektor industri dan sektor-sektor yang lain.

Perwujudan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat melalui:

1. Pembangunan jalan dan jembatan berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang, jasa dan manusia maupun pembentukan struktur ruang wilayah serta membuka kawasan terpencil dan terisolir.
2. Infrastruktur sumber daya air berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri maupun keperluan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.
3. Pembangunan Infrastruktur bidang ke-ciptakarya-an berperan terhadap penyediaan pelayanan infrastruktur aparatur pemerintah daerah, pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan serta revitalisasi kawasan yang diselenggarakan berbasis penataan ruang.

#### **1.4 Permasalahan Utama**

Permasalahan utama pada aspek jalan dan jembatan adalah: (1) Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah, dimana pada tahun 2020 hanya 1.511,11 km (53,97%) kondisi jalan yang baik dari 2.799,81 km; (2) Tingginya tingkat kerusakan jalan provinsi dimana kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat mencapai 1.029,60 km (36,77)%.

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) Tingginya kerusakan jaringan irigasi; (3) Menurunnya daya tampung sungai; (4) kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 1 sampai 2,5 m; (5) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim *sewerage*), (6) Sistem hidrologi lahan basah/gambut belum dioptimalkan.

Permasalahan terkait dengan tata ruang adalah belum semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau belum menetapkan Perda RTRW Kabupaten. Sehingga Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Lahan belum optimal yang berpengaruh pada pengembangan perekonomian dengan pola ekstensifikasi pada pemanfaatan lahan sudah tidak mungkin dilakukan oleh karena itu upaya pengembangan perekonomian kedepan harus berbasis orientasi input secara optimal.

#### **1.5 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **Bab IV – Penutup,**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



**Gambar 1.1 Preservasi Ruas Jalan Rokan Hulu kecamatan Tandun.**



**Gambar 1.2 Penanganan Abrasi Pulau terluar di pulau Rupert.**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Tahun 2019 - 2024**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai upaya penjabaran terhadap Revisi Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2019– 2024 bersifat indikatif.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategis dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan sisa masa periode pemerintahan tahun 2019-2024 yaitu untuk tahun 2020 - 2024.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai ke depan yaitu :

#### **“Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur yang berkualitas”**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi I Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang berbunyi :

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur”, dan sasaran yang berbunyi :

“ Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar”.

Tujuan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama pada infrastruktur pelayanan dasar, sehingga visi dan misi Provinsi Riau dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis yaitu

**“Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.**

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya di arahkan untuk mencapai beberapa indikator sasarannya masing-masing, dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama SKPD)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kondisi akhir RPJMD (akhir 2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan	2	2	2	2	2	2
		Terbukanya akses jalan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	62	65	67	70	70	70
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	62,32	65	67	70	70	70
		Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	5,15	7,22	32,99	32,99	32,99	32,99
			Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya	78,2	78,7	79,3	79,8	80,3	80,3
		Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	53	55	57	59	61	61
			indeks ketahanan air	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
		Tertatanya penggunaan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
			Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	5	7	10	12	15	15
		Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	36,66	49,33	62,00	74,67	87,33	87,33
			Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
			Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
			Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	79,15	79,33	79,52	79,70	79,89	79,89



## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator kinerja utama yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 – 2024. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai acuan pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat Pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Target 2020 (3)
Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan	2 unit
Terbukanya akses jalan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	62 %
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	61,32 %
Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	71,8 %
	Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya	1 wilayah
Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	53 %
	indeks ketahanan air	2,1
Tertatanya penggunaan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	25 %
	Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan	100 %
Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	7,0 %
Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	36,66 %
	Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM	
	Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)	5,17 %
	Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	79,15 %

### 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Sasaran yang ingin di capai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada Tahun 2020 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020

SASARAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2020	TARGET KINERJA PERUBAHAN 2020	PAGU ANGGARAN (Rp)
0	1	2	3	4	5
Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan	2 unit	2 unit	13.561.672.272
Terbukanya akses jalan	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal);	51,08 %	51,08 %	218.130.747.310,75
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid);	17,84 %	17,84 %	
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil);	19,65 %	19,65 %	
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah);	11,4 %	11,4 %	
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Program Preservasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Kemantapan Ruas Jalan Provinsi	63,80 %	63,80 %	254.587.940.790,33
Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani;	9,75 %	9,75 %	8.643.622.800,00
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik;	53 %	29,43 %	
Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Bangunan dan Kawasan Strategis Provinsi yang ditangani	7 %	7 %	7.466.995.000,00
Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan	Persentase peningkatan layanan air minum;	83,04 %	5,15 %	38.295.286.000

SASARAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2020	TARGET KINERJA PERUBAHAN 2020	PAGU ANGGARAN (Rp)
0	1	2	3	4	5
		Persentase peningkatan layanan sanitasi;	70,99 %	70,99 %	
Tertatanya penggunaan ruang	Program Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	25 %	25 %	1.044.273.400
Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Dan Kawasan Permukiman	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh;	188,01 Ha	188,01 Ha	9.261.130.000,00
		Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman;	10,34 %	10,34 %	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	79,15 %	79,15 %	15.041.160.000,00
	Program Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi	100 %	100 %	

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

### 3.1. Capaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 – 2024.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya indikator kinerja utama sesuai dengan target yang telah rencanakan.

Capaian kinerja Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020

lampiran I surat Plt. Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau

No : 050/Bappeda-I/1421

Tanggal : 23 Desember 2020

FORMAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM OPD PROVINSI RIAU

PERANGKAT DAERAH : DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2020	TARGET KINERJA PERUBAHAN 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2020
0	1	2	3	4	5	6
1.1.03.01.1.1.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal);	51,08 %	51,08 %	49,64 %	97,18 %
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid);	17,84 %	17,84 %	16,07 %	90,08 %
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil);	19,65 %	19,65 %	22,42 %	114,10 %
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah);	11,4 %	11,4 %	11,88 %	104,21 %
1.1.03.01.1.1.03.16.	PROGRAM PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Presentase Kemantapan Ruas Jalan Provinsi	63,80 %	63,80 %	62,23 %	97,53 %
1.1.03.01.1.1.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani;	9,75 %	9,75 %	12,69 %	130,15 %
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik;	53 %	53 %	18,64* %	35,17 %
1.1.03.01.1.1.03.18.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Bangunan dan Kawasan Strategis Provinsi yang ditangani	7 %	7 %	0,4 %	5,71 %
1.1.03.01.1.1.03.19.	PROGRAM PENYELENGGARAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase peningkatan layanan air minum;	83,04 %	5,15 %	4,06 %	78,83 %
		Persentase peningkatan layanan sanitasi;	70,99 %	70,99 %	83,99	118.31 %
1.1.03.01.1.1.03.20.	PROGRAM PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	25 %	25 %	24 %	96 %

KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2020	TARGET KINERJA PERUBAHAN 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2020
0	1	2	3	4	5	6
1.1.03.01.1.1.04.15.	PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh;	188,01 Ha	188,01 Ha	206,29 Ha	17,24 %
		Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman;	10,34 %	10,34 %	0	
1.1.03.01.1.1.04.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	79,15 %	79,15 %	78,98 %	99,79 %
1.1.03.01.1.2.04.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERTANAHAN	Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100,00 %

(\*) Program Kegiatan belum terakomodir dalam data

(\*\*) kegiatan hanya SPAM

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau rata-rata adalah sebesar 77,767%

### 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

#### 3.2.1 Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Jalan provinsi Riau menurut SK. Gubernur Riau Nomor : Kpts.308/IV/2017 ada 80 ruas dengan total panjang jalan adalah 2.799,81 Km. Kerusakan yang ditemukan ini hampir merata di seluruh ruas jalan provinsi dan memerlukan perawatan. Jalan provinsi adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten/kota di Riau.

##### a. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal);

Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal) pada Tahun 2020 dari target 51,08%, realiasi 49,64%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,18%, hal ini dapat diartikan bahwa ada kekurangan 2,82% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi Indikator ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap Ruas Jalan Provinsi yang ada di Provinsi Riau.

**b. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid);**

Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid) pada Tahun 2020 dari target 17,48%, realiasi 16,07%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 90,08%, hal ini dapat diartikan bahwa ada kekurangan 9,92% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**c. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil);**

Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil) pada Tahun 2020 dari target 19,65%, realiasi 22,42%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 114,1%, hal ini dapat diartikan bahwa capaian melebihi target 14,1% dari yang telah ditetapkan.

**d. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah);**

Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah) pada Tahun 2020 dari target 11,04%, realiasi 11,88%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,21%, hal ini dapat diartikan bahwa capaian melebihi target 4,21% dari yang telah ditetapkan.

**2. PROGRAM PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN**

**a. Presentase Kemantapan Ruas Jalan Provinsi**

Indikator Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi Baik pada Tahun 2020 dari target 63,8%, realiasi 62,23% sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,53%, hal ini dapat diartikan bahwa ada kekurangan 2,47% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi Indikator ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap Ruas Jalan Provinsi yang ada di Provinsi Riau, sehingga diperoleh panjang jalan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

**3. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA**

**a. Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani;**

Indikator Kinerja Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani pada Tahun 2020 dari target 9,75%, realiasi 12,69%, sehingga

capaian kinerjanya sebesar 130,15%, hal ini dapat diartikan bahwa bahwa capaian melebihi target 30,15% dari yang telah ditetapkan.

**b. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik;**

Indikator Kinerja Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2020 dari target 53%, realiasi 18,64%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 35,17%, disebabkan data Kegiatan belum terakomodir, hal ini dapat diartikan bahwa ada kekurangan 64,83% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator ini diukur dari perbandingan ketersediaan air Irigasi pada musim tanam dengan kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam.

**4. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

**a. Persentase Bangunan dan Kawasan Strategis Provinsi yang ditangani**

Kewenangan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota. Pembangunan Sarana Ibadah Strategis Provinsi diantaranya adalah Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau, capaian target hanya 0,4% karena Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung mengalami refocusing anggaran sehingga tidak dijalankan.

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

**a. Persentase peningkatan layanan air minum;**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan layanan air minum pada Tahun 2020 dari target 5,15%, realiasi 5,15%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%, tahun 2019 sebelumnya target adalah 80,04% hal ini terjadi kerana perubahan RKPD-P 2020 bahwa target kegiatan hanya SPAM regional Provinsi Riau.



**b. Persentase peningkatan layanan sanitasi;**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan layanan sanitasi pada tahun 2020 dari target 70,99%, Realisasi 83,99%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,31% perhitungan dari BPS.

**6. PROGRAM PENATAAN RUANG**

**a. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2020 dari target 25%, realiasi 24%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 96%, hal ini dapat diartikan bahwa ada kekurangan capaian target 4% dari yang telah ditetapkan.

**7. PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**a. Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh;**

Indikator Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh berdasarkan Luas kawasan kumuh sesuai SK 2019 adalah 249,27 Ha. Pada tahun 2020 luas kawasan kumuh tertangani sebesar 5 Ha, dari target Total penanganan kawasan kumuh sampai dengan 2020 adalah 42,98 Ha. Sehingga luas kawasan kumuh tersisa 206,29 Ha dari target penurunan luasan kawasan permukiman kumuh 188,01 Ha, capaian 17,24%.

**b. Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada Tahun 2020 dari target 10,34%, realiasi 0%, hal ini karena kegiatan belum terakomodir dalam Renja.

**8. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

**a. Indikator Persentase Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Pada tahun 2020 dari target 79,15% terealisasi 78,98%. Sehingga capaian kinerja 99,79%. Terdapat 3 unit RLH yang tidak dilaksanakan karena pindah alamat.**

## 9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERTANAHAN

### a. Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi

Indikator Kinerja Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi pada tahun 2020 dari target 100% dan realisasi 100%.

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya yaitu Tahun 2019

Indikator Kinerja yang dapat di lakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya terdapat (lima) indikator Kinerja, Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu yaitu Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

Realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan				2	2	100%
2.	Terbukanya akses jalan	Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal);		47,61		51,08	49,64	97,18%
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid);		15,48		17,84	16,07	90,08
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil);		25,03		19,65	22,42	114,10
		Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah);		11,87		11,4	11,88	104,21
3.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Ruas Jalan Provinsi	59,5	47,15	79,25	63,80	62,23	97,53
4.	Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani;	45	37	82,22	9,75	12,69	130,15
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik;	70	51	72,86	53	18,64	35,17

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	Persentase Bangunan dan Kawasan Strategis Provinsi yang ditangani				7	0,4	5,71
5.	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase peningkatan layanan air minum;	93,84	87,42 %*	93,15	5,15	5,15**	100
		Persentase peningkatan layanan sanitasi;	36,5	(*)	(*)	70,99	(*)	(*)
6.	Tertatanya penggunaan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				25	24	96
7.	Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh;				188,01	206,29	17,24
		Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman;				10,34	0	0
		Persentase Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin				79,15	78,98	99,79
		Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi				100	100	100

(\*) Capaian Program Kegiatan menunggu data BPS

(\*\*) kegiatan hanya SPAM

Dari Tabel 3.2 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan;

Indikator Kinerja Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan tahun 2019 dari target 2 unit realisasi 2 unit, dengan pencapaian 100%.

- b. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal);

Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal) tahun 2019, realisasi kinerjanya sebesar 47,61 %, dan Pada Tahun 2020 realisasi kinerjanya 49,64 % dengan pencapaian sebesar 97,18 % dari target 51,08 % sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,03 %.

- c. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid);  
Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid) tahun 2019, realisasi kinerjanya sebesar 15,48 %, dan Pada Tahun 2020 realisasi kinerjanya 16,07 % dengan pencapaian sebesar 90,08 % dari target 17,84 % . sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,59 %.
- d. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil);  
Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil) tahun 2019, realisasi kinerjanya sebesar 25,03 %, dan Pada Tahun 2020 realisasi kinerjanya 22,42 % dengan pencapaian sebesar 114,1 % dari target 19,65 % .
- e. Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah);  
Indikator Kinerja Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah) tahun 2019, realisasi kinerjanya sebesar 11,87 %, dan Pada Tahun 2020 realisasi kinerjanya 11,88 % dengan pencapaian sebesar 104,21 % dari target 11,4 % . sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,01 %.
- f. Presentase Kemantapan Ruas Jalan Provinsi;  
Indikator Kinerja Presentase Kemantapan Ruas Jalan Provinsi tahun 2019, realisasi kinerjanya sebesar 47,15 %, capaian kinerja 79,25 % dan Pada Tahun 2020 realisasi kinerjanya 62,23 % dengan pencapaian sebesar 97,53 % dari target 63,8 % . sehingga jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,01 %.
- g. Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani;  
Indikator Kinerja Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani pada Tahun 2019 dari target 45%, realisasi 37%, sehingga capaian kinerja sebesar 82,22%. Sedangkan pada Tahun 2020, target 9,75 dengan realisasinya 12,69% sehingga pencapaian sebesar 130%, sehingga jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 37,78 %.

- h. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik;  
Indikator kinerja Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 dari target 70%, realisasi 51%, sehingga capaian kinerja sebesar 72,86%, Sedangkan pada Tahun 2020, realisasinya 18,64 % dengan pencapaian sebesar 35,17%, sehingga jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 37,69 %.
- i. Persentase peningkatan layanan sanitasi;  
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan layanan sanitasi pada tahun 2020 dari target 79,00%, Realisasi belum dapat dihitung, karena Capaian Program Kegiatan menunggu perhitungan dari BPS.
- j. Persentase peningkatan layanan air minum;  
Indikator Kinerja Persentase peningkatan layanan air minum pada tahun 2019, realisasi Kinerja 87,42 % dengan pencapaian sebesar 93,15 %. Sedangkan pada Tahun 2020, realisasinya 5,15 % dengan pencapaian sebesar 100%, target Pada RKPD-P terjadi perubahan target persentase peningkatan layanan air minum yang semula dari 83,04 persen menjadi 5,15 persen, sehingga jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,85 %.
- k. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang  
Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2020 dari target 25%, Realisasi 24%, ini berarti capaian kinerja sebesar 96%.
- l. Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh;  
Indikator Kinerja Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2020 dari target 188,01 Ha Realisasi 206,29 Ha, ini berarti capaian kinerja sebesar 17,24 Ha
- m. Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman;  
Indikator Kinerja Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada tahun 2020 dari target 10,34% Realisasi 0%, ini dikarenakan refocusing anggaran.

n. Persentase Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin pada tahun 2020 dari target 79,15 % Realisasi 78,98 ini berarti capaian kinerja sebesar 99,79%

o. Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 36,66%

p. Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi

Indikator Kinerja Persentase Urusan Pertanahan yang Terfasilitasi pada tahun 2020 dari target 100 % Realisasi 100% ini berarti capaian kinerja sebesar 100%

### 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2019 – 2024)

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan target Jangka Menengah yaitu RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja S/D Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi s/d 2020	Target Akhir Renstra	Capaian s.d 2020 terhadap target akhir renstra
(1)	(2)	(3)		
Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	a. Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan	2 unit	3 unit	66,7%
Terbukanya akses jalan	b. Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	63,09 %	70%	88,5%
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	c. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	62,23 %	69,8%	87,8%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi s/d 2020	Target Akhir Renstra	Capaian s.d 2020 terhadap target akhir renstra
(1)	(2)	(3)		
Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	d. persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	4,06 %	78,8%	91,1%
	e. Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya	1 wilayah	1	1
Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	f. Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	29,13 %	61%	86,9%
	g. indeks ketahanan air	2,1	2,5	84%
Tertatanya penggunaan ruang	h. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	24 %	45%	55,5%
	i. Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan	100 %	100%	100%
Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	j. persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	0,42 %	51,7%	9,7%
Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	k. Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	17,24 %	76,13%	48,1%
	l. Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM	0	5,17%	100%
	m. Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)	0	5,17%	100%
	n. Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	78,98 %	79,89%	99,07

Dari Tabel 3.3 dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan**

Indikator Kinerja Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 2 unit, sedangkan target akhir Renstra sebesar 3 unit, sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 66,7% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 33,3% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**b. Persentase jalan dan jembatan yang dibangun**

Indikator Kinerja Persentase jalan dan jembatan yang dibangun realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 63,09%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 70%, sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 90,12% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 9,18% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**c. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap**

Indikator Kinerja Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 63,23%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 69,8%, sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 90,58% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 9,42% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**d. persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum**

Indikator Kinerja persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 4,06% karena refocusing, sedangkan target akhir Renstra sebesar 78,8%, sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 5,15%, Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 84,85% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**e. Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya**

Indikator Kinerja persentase jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 1 wilayah, sedangkan target akhir Renstra 1 wilayah sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 100% Sehingga mencapai target yang telah ditetapkan.

**f. Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik**

Indikator Kinerja Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 29,43%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 61% sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 48,24% Sehingga masih ada kekurangan



realisasi kinerja sebesar 51,76% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**g. Indeks ketahanan air**

Indikator Kinerja Indeks ketahanan air realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 2,1 sedangkan target akhir Renstra sebesar 2,5 sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 84% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 16% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**h. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**

Indikator Kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 24%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 45% sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 53,33% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 46,67% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**i. Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan**

Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 100%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 100% sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 100%.

**j. Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata**

Indikator Kinerja persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 0,4% karena refocusing, sedangkan target akhir Renstra sebesar 51,7% sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 0,77% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 99,23% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**k. Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman**

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 17,24%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 76,13% sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 22,64% Sehingga masih ada kekurangan

realisasi kinerja sebesar 77,36% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**l. Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM**

Indikator Kinerja Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 0% karena refocusing, sedangkan target akhir Renstra sebesar 5,17% sehingga capaian S/D tahun 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 0%.

**m. Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)**

Indikator Kinerja Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase) realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 0% karena refocusing, sedangkan target akhir Renstra sebesar 5,17% sehingga capaian S/D tahun 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 0%.

**n. Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin**

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 78,98%, sedangkan target akhir Renstra sebesar 79,89% sehingga capaian S/D 2020 terhadap target akhir Renstra sebesar 98,86% Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar 1,14% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan, telah menetapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Daerah untuk Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dengan target Tahun 2020 sebesar 70 %.
2. Indikator Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang dengan Target Tahun 2020 sebesar 62 %;
3. Indikator Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi dengan Target Tahun 2020 adalah sebesar 100 %;
4. Indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan target Tahun 2020 sebesar 100 %.
5. Indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital dengan target Tahun 2020 sebesar 100 %.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencapai target SPM. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM Nasional, pada RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 hanya terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi penunjang SPM Nasional yaitu:

a. Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi

Baik

Indikator ini hampir sama dengan Indikator SPM nasional yaitu Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang. Pada Tahun 2020, Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik adalah 1.511,11 Km, Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang adalah 259,10 Km. Sedangkan panjang Jalan Provinsi adalah 2.799,81 Km, sehingga Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang adalah sebesar 63.22 %. Target Akhir SPM nasional pada tahun 2020 adalah 62 %, sehingga capaian melebihi dari target Akhir SPM Nasional sebesar 1,22 % untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- b. Kecukupan Ketersediaan air Irigasi
- indikator Kinerja kecukupan ketersediaan air Irigasi realisasi sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 53%, target akhir SPM nasional pada tahun 2020 adalah 70%, sehingga masih ada kekurangan sebesar 17% untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

### **3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan**

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu dan tepat sasaran;
- Manajemen pelaksanaan yang efisien;
- Kebutuhan dana untuk pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur terpenuhi;
- Kondisi Alam yang mendukung.
- Bencana Alam, seperti pandemi Corona Virus Disease 19

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang infrastruktur antara lain sebagai berikut :

1. Diluar masalah teknis, adanya rasionalisasi anggaran setiap tahunnya menyebabkan capaian secara teknis tidak terpenuhi;
2. Dokumen DED TPA Regional Pekanbaru-Kampar belum dilaksanakan. Awalnya dianggarkan di APBN 2020, namun karena mengalami refocusing anggaran dan tidak terlaksana diserahkan ke APBD;
3. Terbatasnya anggaran APBN dan APBD dalam menangani kegiatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan daerah irigasi/ daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi sehingga masih banyaknya potensi daerah irigasi dan rawa yang belum dapat difungsikan secara Optimal, sementara saluran irigasi yang ada telah banyak mengalami kerusakan. Pada saat ini kinerja Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan (DI) sekitar 60% sedangkan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) kurang dari 60 %.
4. Terjadinya abrasi. pantai pada Wilayah Sungai yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan pantai, terutama pada musim banjir hingga saat

ini masih terus diupayakan semaksimal mungkin untuk mencari solusi dan rumusan serta konsep yang tepat untuk penanggulangannya, sebagai contoh panjang abrasi pantai pada wilayah sungai sekitar 167 km untuk wilayah Sungai Bengkalis - Meranti;

5. Kondisi pelayanan jalan yang cukup memprihatinkan pada Jalan Provinsi, disamping kondisi pelayanan, kondisi permukaan jalan di Provinsi Riau serta banyaknya jembatan yang sudah wajib direhabilitasi maupun diganti, meskipun sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dari yang diharapkan, serta adanya angkutan barang yang membawa muatan lebih (overload) melebihi kapasitas Muatan Sumbu terberat (MST) jalan yang makin menambah deretan permasalahan di bidang prasarana jalan, Kondisi Jalan yang mantap saat ini sekitar 63,23% sedangkan yang tidak mantap 36,77 %.
6. SPAM Regional I pada wilayah Kota Pekanbaru dan Kampar, SPAM Regional II pada wilayah Kab. Rokan Hilir, Bengkalis dan Kota Dumai belum berfungsi secara optimal;
7. Belum ditetapkannya instrumen peraturan daerah tentang sistem zonasi wilayah Provinsi yang menjadi dasar dalam pemberian insentif, disinsentif dan pengenaan sanksi dan belum seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Perda Tata Ruang, sampai awal Tahun 2020, baru 7 kabupaten yang memiliki Perda Tata Ruang atau sekitar 60% yaitu Kota Dumai, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Rokan hulu, Kota Pekanbaru dan kepulauan Meranti sedangkan 5 Kabupaten lagi sedang proses penyempurnaan dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu, kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan singingi;

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi di Bidang Infrastruktur saat ini, maka upaya pemecahan masalah tetap dilakukan melalui berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam rangka memacu ketertinggalan pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini. Berbagai upaya yang telah ditempuh tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan kinerja perlu diprioritaskan kegiatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan daerah irigasi/daerah irigasi rawa kewenangan provinsi dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan program pemeliharaan jaringan irigasi baik dengan melakukan normalisasi maupun perbaikan saluran;
2. Pembangunan bangunan pengaman pada bantaran sungai dan bangunan pengaman pantai dalam upaya mencegah dampak abrasi yang lebih parah;
3. Optimalisasi anggaran yang tersedia dengan mengedepankan prioritas kepada pekerjaan utama (mayor) dan pekerjaan pelengkap (minor) yang tidak dapat ditangguhkan, target kualitas yang diharapkan terhadap Pembangunan ruas-ruas jalan dan jembatan strategis, serta upaya preservasi ruas-ruas Jalan Provinsi dalam upaya menjaga fungsional jalan, yang dilakukan secara rutin dan berkala serta melakukan sosialisasi bersama dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tentang muatan angkutan dan cara berkendara yang baik (Road safety);
4. Melakukan Percepatan Operasional dan optimalisasi pada pengelolaan SPAM Regional;
5. Melakukan percepatan proses fasilitasi Perda Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Pemerintah dan Stakeholder terkait ber-sinergi dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur maupun Penyedia Jasa Konstruksi;
7. Memberikan saran dan masukan kepada instansi lainnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang

### **3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

#### **Pernyataan Kinerja**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dalam mencapai target indikator

kinerja yang tertuang dalam RPJMD didukung oleh 14 (empat belas) Program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Adapun program yang mendukung diperlihatkan pada table 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian

Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Realisasi
			Murni	Perubahan				%
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi	3 unit	2 unit	2 unit	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>		
							Pembangunan Sarana Ibadah Strategis Provinsi	82,96
							Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau	100,00
2	Terbukanya akses jalan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	62,00%	62,00 %	63,09%	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>		
							Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah I	82,507
							Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	80,705
							Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan	96,89
							Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah I	90,851
							Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah II	91,587
3	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	62%	61,32 %	61,32%	<b>Program Preservasi Jalan dan Jembatan</b>		
							Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah I	80,582
							Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah II	71,329
							Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I (Swakelola)	99,895
							Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II (Swakelola)	99,703

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Realisasi
			Murni	Perubahan				%
1	2	3	4		5	6	7	8
							Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III (Swakelola)	96,01
							Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Swakelola)	93,55
							Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V (Swakelola)	98,699
							Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Swakelola)	65,812
							Preservasi Jalan Provinsi Wilayah I	96,006
							Preservasi Jalan Provinsi Wilayah II	92,923
							Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I (Swakelola)	99,671
							Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II (Swakelola)	25,047
							Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III (Swakelola)	98,944
							Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Swakelola)	93,728
							Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V (Swakelola)	93,583
							Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Swakelola)	80,134
							Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan	90,918
4	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air	5,15%	5,15%	5,15%	<b>Program Penyelenggaraan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan</b>		
							Perencanaan SPAM Regional Provinsi Riau	78,596
							Pembangunan SPAM Regional Provinsi Riau	97,119
							Pengelolaan SPAM Regional Provinsi Riau	67,862



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Realisasi
			Murni	Perubahan				%
1	2	3	4		5	6	7	8
5		Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya	1 wilayah	1 Wilayah	0	<b>Program Penyelenggaraan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan</b>		
							Perencanaan TPA Regional Provinsi Riau	68,265
							Pengadaan Lahan TPA Regional Provinsi Riau	92,354
							Pembinaan Teknis Sektor Air Minum dan Sanitasi	87,414
6	Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	53%	18,64 %	18,64%	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>		
							Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Irigasi dan Rawa Kewenangan Provinsi	75,218
							Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Permukaan (DI) Kewenangan Provinsi	82,242
							Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi	83,118
7		indeks ketahanan air	2,1	2,10	2,08	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>		
							Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dan REKOMTEK Perizinan Sumber Daya Air	76,103
							Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	99,699
8	Tertatanya penggunaan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	25%	25%	24%	<b>Program Penataan Ruang</b>		
							Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	62,380
							Pengaturan Dan Pembinaan Penataan Ruang	82,071
							Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang	65,656

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Realisasi
			Murni	Perubahan				%
1	2	3	4		5	6	7	8
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	<b>Program Penyelenggaraan Pertanahan</b>		
							Perencanaan dan Pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum	79,812
							Penyelesaian Tanah Garapan Provinsi	16,123
	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	7%	7%	0,4%	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>		
							Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	
							Perencanaan Bangunan Gedung Strategis Provinsi	84,45
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Strategis Provinsi	81,45
	Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	36,66 %	36,66 %	33,61%	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>		
							Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi	96,017
							Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau	80,534
							Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	77,428
		Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM	5,17%	5,17%	0	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>		
							Pembangunan /Peningkatan SPAM Permukiman Provinsi Riau	
		Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)	5,17%	5,17%	0	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian Kinerja	Program	Kegiatan	Realisasi
			Murni	Perubahan				%
1	2	3	4		5	6	7	8
							Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	
		Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	79,15 %	78,98 %	78,98%	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		
							Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	
							Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I	91,834
							Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II	90,808
							Pendataan/Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau	93,752

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja program untuk setiap indikator sasaran rata – rata 85,378 %. Program yang mempunyai realisasi rendah yaitu Program Penyehatan Lingkungan Permukiman hal ini karena pada kegiatan Pembinaan Teknis Sektor Sanitasi Provinsi Riau tidak maksimal karena terkendala sosialisasi yang belum terakomodir .

Rincian target kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat Pada Lampiran 2.

### 3.3 Akuntabilitas Anggaran

Pagu Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar Rp. 720.073.776.644,72 (tujuh ratus dua puluh milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah). Pagu Anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar adalah sebesar Rp.

644.880.188.215,72 (89,55%) sedangkan untuk program/kegiatan pendukung adalah sebesar Rp. 75.193.588.429,00 atau 10,45 %.

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yaitu sebesar Rp. 644.880.188.215,72 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Indikator Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi, program yang mendukung indikator tersebut adalah Program Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan pagu Rp. 13.561.672.272,24- dan realisasi adalah Rp. 12.762.124.774,33- (94,10%)
- b. Untuk Indikator Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dan persentase jalan dan jembatan yang dibangun, program yang mendukung indikator tersebut adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan total pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 472.718.688.101,08- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 418.680.067.145,- (88,57 %).
- c. Untuk Indikator Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air, Program yang mendukung indikator tersebut adalah Program Penyelenggaraan air minum dan Penyehatan Lingkungan dengan pagu anggaran yaitu sebesar Rp.27.068.042.133,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.984.285.570,06- (92,30%);
- d. Untuk Indikator Kinerja Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi, program yang mendukung indikator pencapaian kinerja anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6

Capaian kinerja anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
						Rp	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>				
				Pembangunan Sarana Ibadah Strategis Provinsi	4.692.838.400,00	3.893.290.902,09	82,96
				Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau	8.868.833.872,24	8.868.833.872,24	100,00
	Terbukanya akses jalan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>				
				Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah I	16.294.797.299,38	13.444.404.351,00	82,507
				Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	30.133.045.492,37	24.319.005.570,00	80,705
				Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan	9.051.648.726,75	8.769.667.725,00	96,89
				Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah I	86.916.805.259,93	78.965.089.230,00	90,851
				Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah II	75.734.450.532,32	69.362.695.495,00	91,587
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	<b>Program Preservasi Jalan dan Jembatan</b>				
				Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah I	5.569.771.450,00	4.488.216.356,00	80,582
				Preservasi Jembatan Provinsi Wilayah II	6.624.194.300,00	4.724.980.090,00	71,329
				Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I (Swakelola)	2.035.242.000,00	2.033.096.000,00	99,895
				Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II (Swakelola)	899.435.150,00	896.768.000,00	99,703
				Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III (Swakelola)	1.183.205.850,00	1.135.945.000,00	96,01
				Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Swakelola)	300.000.000,00	280.647.000,00	93,55

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
						Rp	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V (Swakelola)	891.358.000,00	879.765.100,00	98,699
				Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Swakelola)	1.139.059.000,00	749.633.800,00	65,812
				Preservasi Jalan Provinsi Wilayah I	72.230.752.014,00	67.118.649.385,00	96,006
				Preservasi Jalan Provinsi Wilayah II	82.082.648.463,55	77.773.366.043,00	92,923
				Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I (Swakelola)	15.690.137.887,00	15.638.547.800,00	99,671
				Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II (Swakelola)	18.184.758.800,00	4.554.650.900,00	25,047
				Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III (Swakelola)	11.001.813.600,00	10.885.628.200,00	98,944
				Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Swakelola)	9.456.721.608,00	8.863.605.000,00	93,728
				Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V (Swakelola)	12.082.933.600,00	11.307.588.300,00	93,583
				Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Swakelola)	12.480.840.503,78	10.001.440.800,00	80,134
				Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan	2.735.068.564,00	2.486.677.000,00	90,918
	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air	<b>Program Penyelenggaraan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan</b>				
				Perencanaan SPAM Regional Provinsi Riau	1.228.625.150,00	965.649.800,00	78,596
				Pembangunan SPAM Regional Provinsi Riau	22.160.636.983,00	21.522.132.196,51	97,119
				Pengelolaan SPAM Regional Provinsi Riau	3.678.780.000,00	2.496.503.573,55	67,862
		Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya	<b>Program Penyelenggaraan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan</b>				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
						Rp	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perencanaan TPA Regional Provinsi Riau	175.478.000,00	119.789.989,00	68,265
				Pengadaan Lahan TPA Regional Provinsi Riau	10.893.741.867,00	10.060.769.600,00	92,354
				Pembinaan Teknis Sektor Air Minum dan Sanitasi	158.024.000,00	138.135.000,00	87,414
	Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>		8.643.622.800,00		
				Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Irigasi dan Rawa Kewenangan Provinsi	55.443.800,00	41.703.800,00	75,218
				Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Permukaan (DI) Kewenangan Provinsi	6.336.325.600,00	5.211.133.133,80	82,242
				Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi	2.251.853.400,00	1.871.705.488,67	83,118
		indeks ketahanan air	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>				
				Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dan REKOMTEK Perizinan Sumber Daya Air	39.064.000,00	29.729.000,00	76,103
				Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2.168.111.600,00	2.161.590.724,87	99,699
	Tertatanya penggunaan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	<b>Program Penataan Ruang</b>				
				Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	120.662.000,00	75.269.167,00	62,380
				Pengaturan Dan Pembinaan Penataan Ruang	186.537.000,00	153.092.781,00	82,071
				Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang	364.876.400,00	239.563.002,00	65,656

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
						Rp	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan	<b>Program Penyelenggaraan Pertanahan</b>				
				Perencanaan dan Pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum	222.198.000,00	177.340.844,00	79,812
				Penyelesaian Tanah Garapan Provinsi	150.000.000,00	24.183.890,00	16,123
	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>				
				Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau	-		
				Perencanaan Bangunan Gedung Strategis Provinsi	2.182.700.000,00	1.843.283.750,00	84,45
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Strategis Provinsi	5.284.295.000,00	4.304.047.371,00	81,45
	Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>				
				Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi	225.760.000,00	216.767.550,00	96,017
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Riau	5.497.295.000,00	4.427.164.686,45	80,534
				Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	3.538.075.000,00	2.739.471.847,00	77,428
		Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman</b>				
				Pembangunan /Peningkatan SPAM Permukiman Provinsi Riau	-*		
				Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Provinsi Riau	-*		
		Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
						Rp	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi			
				Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah I	6.817.500.000,00	6.260.808.000,00	91,834
				Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau Wilayah II	7.680.000.000,00	6.974.088.934,00	90,808
				Pendataan/Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni Provinsi Riau	543.660.000,00	509.693.000,00	93,752

(\*) mengalami refocusing anggaran

Rincian anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat Pada Lampiran

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang sangat baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang terserap untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7  
Perbandingan Antara Kinerja Pencapaian Sasaran Dengan Penyerapan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Perubahan Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Bangunan	4.692.838.400	3.893.290.902	82,96
2	Terbukanya akses jalan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	62%	62%	63,09 %	2 unit jembatan	16.294.797.299	13.444.404.351	82,51
		-	-	-	3 Unit Jembatan	30.133.045.492	24.319.005.570	80,71	
		-	-	-	5 Dokumen	9.051.648.727	8.769.667.725	96,88	
		-	-	-	14 Km	86.916.805.260	78.965.089.230	90,85	
		-	-	-	11 Km	75.734.450.532	69.362.695.495	91,59	
3	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	62%	61,32%	62,23 %	3 Unit Jembatan	5.569.771.450	4.488.216.356	80,58

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Perubahan Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian
		-	-	-	-	2 unit jembatan	6.624.194.300	4.724.980.090	71,33
		-	-	-	-	4 Unit Jembatan	2.035.242.000	2.033.096.000	99,89
		-	-	-	-	4 Unit Jembatan	899.435.150	896.768.000	99,70
		-	-	-	-	4 Unit Jembatan	1.183.205.850	1.135.945.000	96,01
		-	-	-	-	2 Unit Jembatan	300.000.000	280.647.000	93,55
		-	-	-	-	8 Unit Jembatan	891.358.000	879.765.100	98,70
		-	-	-	-	4 Unit Jembatan	1.139.059.000	749.633.800	65,81
		-	-	-	-	92 Km	72.230.752.014	67.118.649.385	92,92
		-	-	-	-	137 Km	82.082.648.464	77.773.366.043	94,75
		-	-	-	-	120 Km	15.690.137.887	15.638.547.800	99,67
		-	-	-	-	90 Km	18.184.758.800	4.554.650.900	25,05
		-	-	-	-	72 Km	11.001.813.600	10.885.628.200	98,94
		-	-	-	-	80 Km	9.456.721.608	8.863.605.000	93,73
		-	-	-	-	80 Km	12.082.933.600	11.307.588.300	93,58
		-	-	-	-	80 Km	12.480.840.504	10.001.440.800	80,13
		-	-	-	-	3 Dokumen	2.735.068.564	2.486.677.000	90,92
4	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	5,15%	5,15%	5,15%	2 Dokumen	1.228.625.150	965.649.800	78,60
		-	-	-	-	3545 M	22.160.636.983	21.522.132.197	97,12
		-	-	-	-	140 Liter/ Detik	3.678.780.000	2.496.503.574	67,86
		Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya	1 Wilayah	1 Wilayah	0 Wilayah	2 Dokumen	175.478.000	119.789.989	68,26
		-	-	-	-	12 Ha	10.893.741.867	10.060.769.600	92,35
		-	-	-	-	12 Wilayah	158.024.000	138.135.000	87,41
5	Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	53%	18,64%	18,64 %	1 Dokumen	55.443.800	41.703.800	75,22
		-	-	-	-	115 Km	6.336.325.600	5.211.133.134	82,24
		-	-	-	-	50 Km	2.251.853.400	1.871.705.489	83,12
		Indeks ketahanan air	2,1	2,1	2,08	1 Dokumen	39.064.000	29.729.000	76,10
		-	-	-	-	8 Sungai	2.168.111.600	2.161.590.725	99,70
		-	-	-	-	-			
6	Tertatanya penggunaan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	25%	25%	24%	2 Laporan	120.662.000	75.269.167	62,38
		-	-	-	-	2 Dokumen	186.537.000	153.092.781	82,07
		-	-	-	-	1 Dokumen	364.876.400	239.563.002	65,66
		-	-	-	-	-			
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	1 Dokumen	222.198.000	177.340.844	79,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Perubahan Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian
		-	-	-	-	-	150.000.000	24.183.890	16,12
7	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	7%	7%	0,4%	6 Dokumen	2.182.700.000	1.843.283.750	84,45
		-	-	-	-	4 Unit Bangunan	5.284.295.000	4.304.047.371	81,45
		-	-	-	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	36,66 %	36,66%	17,24 %	2 Dokumen	225.760.000	216.767.550	96,02
						3 Kawasan	5.497.295.000	4.427.164.686	80,53
		Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM	5,17% *	5,17%	0%	2080 M 2 Dokumen	3.538.075.000	2.739.471.847 647.419.150	77,43
		Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)	5,17%	5,17%	0%	1 Dokumen		21.675.000	
		Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	79,15 %	78,98%	78,98%	103 Unit	6.817.500.000	6.260.808.000	91,83
						107 Unit	7.680.000.000	6.974.088.934	90,81
						1 Rusunawa	3.152.100.000	2.079.095.533	65,96
		-	-	-	-	2 Dokumen	543.660.000	509.693.000	93,75

\*Perubahan target SKPD-P

### 3.4 Analisis Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan keluaran (output) yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indicator Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan, pencapaian kinerja 3 unit bangunan (100%), dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar 82,96 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 17,04%;
- b. Untuk indikator Persentase jalan dan jembatan yang dibangun pencapaian kinerja 63,09% dari target 62%, ini berarti persentase capaian kinerja 101,76%, dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar 89,33 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 12,43%;
- c. Untuk indicator Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pencapaian kinerja 101,48%, dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar 87,9 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 13,57%;
- d. Untuk indicator Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum pencapaian kinerja 100%, dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar 92,3%, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 7,7%;
- e. Untuk indicator Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya pencapaian kinerja 100%, dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar 91,9%, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 8,09%;
- f. Untuk indicator Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik, pencapaian kinerja 18,64%, dari target 18,64% dari perubahan target semula 53% dengan penyerapan anggaran sebesar 82,42%, ini menunjukkan adanya efisiensi 17,58%
- g. Untuk Indikator Kinerja Indeks ketahanan air Indeks ketahanan air, pencapaian kinerja sebesar 99,04 %, dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar 99,28 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 0,72 %;
- h. Untuk Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pencapaian kinerja sebesar 96%, dengan penyerapan anggaran sebesar 69,62 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 30,28%;

Adapun efisiensi penyerapan anggaran dapat dilihat pada table 3.8 berikut :

Tabel 3.8

## Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Program/Kegiatan Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya bangunan gedung untuk kepentingan keagamaan strategis Provinsi	Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan	166,67	82,96	17,04
2	Terbukanya akses jalan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	63,09	89,33	12,43
3	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	63,23	87,9	13,57
4	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	78,83	92,3	7,7
5	Meningkatnya penatagunaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	39,7	91,9	8,09
6	Tertatanya penggunaan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	96	82,42	17,58
7	Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan sesuai aturan	Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	5,71	99,28	0,72
8	Meningkatnya Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	47,03	96	30,28

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan Umum

Pertanggung Jawaban Kinerja Tahunan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau untuk Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Pada tahun 2020 terhadap target ada 8 (delapan) indicator, sasaran rata – rata sebesar 94,58 %, dengan penjelasan :

- a. Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan sebesar 100%
- b. Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dan persentase jalan dan jembatan yang dibangun Sebesar 90,70 %;
- c. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sebesar 100 %;
- d. Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik sebesar 100%;
- e. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 100%;
- f. Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata sebesar 99,04%
- g. Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebesar 69,62%

Langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan informasi terbaru terhadap kondisi jalan dan jembatan setiap tahunnya agar diperoleh prioritas penanganan yang dianggarkan di tahun berikutnya terhadap sarana jalan dan jembatan;
2. Kebijakan penganggaran untuk sektor irigasi kewenangan provinsi ditekankan khususnya rehabilitasi dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi/daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi;
3. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendukung ketahanan air yaitu pendukung sarana dan prasarana air baku dan pengendalian daya rusak air;
4. Menetapkan instrumen peraturan daerah tentang sistem zonasi wilayah Provinsi;

5. Mengalokasikan kembali kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Riau di tahun 2021;
6. Meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara periodik dan *show case meeting* secara berjenjang;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait di lokasi kegiatan, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah non teknis, seperti: pembebasan lahan terutama kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Riau sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan dan tepat guna;
9. Mempercepat proses pengadaan barang jasa, agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik;
10. Meningkatkan kualitas dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;

# LAMPIRAN